BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Untuk itu, maka Indonesia juga merasa perlu mengeluarkan kebijakan mendirikan bank pusat Negara Indonesia yakni Bank Indonesia (BI). Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan perbankan sangat menentukan perkembangan perekonomian di suatu negara untuk kedepannya. Jika kondisi perbankan stabil maka perekonomian suatu negara juga akan stabil. Namun, jika kondisi perbankan mengalami kelabilan maka perekonomian suatu negara juga akan labil. Hal ini merupakan bukti pentingnya perbankan sebagai pengelola kebijakan moneter di suatu Negara termasuk Indonesia. 1

Dalam dunia perbankan sendiri terdapat dua bentuk yaitu bank konvensional dan syariah. Bank konvensional dalam kegiatannya menggunakan sistem bunga yang terinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang dimanfaatkan melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjam kembali masyarakat dengan tambahan berupa bunga sedangkan prinsip syariah berdasarkan hukum Islam dan tidak mengenal bunga tetapi bagi

Hamli Saifullah. *Perbankan Syariah dan Optimalisasi sector Pertanian.*

⁽http://inspirasibangsa.com/perbankan-syariah-dan-optimalisasi-sektor-pertanian./ (28 April 2013)

hasil.² Adanya hal ini membuat sebagian masyarakat ada yang tidak setuju dengan kegiatan yang dilakukan bank konvensional tersebut, sehingga lebih condong untuk menggunakan prinsip syariah.

Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam firmannya:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29).³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lain telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem

_

²Tiar Ramon. *Perbankan Syariah Indonesia Indonesia ditinjau dari Filsafat Islam* (http://tiarramon.wordpress.com/2013/05/14/perbankan-syariah-indonesia-ditinjau-dari-filsafat-hukum-islam-oleh-tiar-ramon)

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 65.

bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.⁴

Semakin pesatnya perkembangan bank berbasis syariah telah mendorong BI sebagai regulator perbankan untuk mengeluarkan undang-undang nomor 21/2008 tentang perbankan syariah sebagai regulasi perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam, sedangkan hukum Islam tersebut bersumber dari Al-quran dan hadis yang kemudian disatukan dalam bentuk *Fiqh Muamalah*.⁵

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi negara pelopor dan kiblat perkembangan perbankan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil, karena Indonesia memiliki potensi untuk menjadi *global player* (pemain dunia) perbankan syariah. Potensi tersebut yaitu Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar sehingga sangat potensial untuk dijadikan nasabah pada industri perbankan syariah, prospek ekonomi cerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi relatif tinggi serta ditopang oleh dasar ekonomi yang solid, peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri perbankan syariah dan

_

⁴Lidia Mulia Setiawan. *Perkembangan perbankan syriah di Indonesia* (http://lydiasetiawan.wordpress.com/2013/11/26/perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia/)

⁵Hamli Saifullah. Perbankan Syariah dan Optimalisasi sector Pertanian (http://inspirasibangsa.com/perbankan-syariah-dan-optimalisasi-sektor-pertanian./(28 April 2013)

memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri perbankan syariah.⁶

Industri perbankan syariah tentu tidak lepas dari pembiayaan dalam menopang ekonomi nasional terutama pada peningkatan pembiayaan di sektor pertanian yang saat ini belum diikuti pemahaman serta pengetahuan para petani terhadap sistem operasional perbankan syariah, mekanisme dan cara mengakses skim-skim pembiayaan untuk pertanian pada perbankan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat *aksesibilitas* petani dalam memperoleh pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usaha taninya dari perbankan syariah yang saat ini sedang tumbuh pesat.⁷

Perkembangan jumlah perbankan di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2013 terus mengalami peningkatan. Peluang pengembangan perbankan syariah semakin besar pasca penetapan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) dengan besarnya peningkatan jumlah perbankan syariah. Bank Indonesia (2013) mencatat Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan jumlah bank, dari 3 bank di tahun 2007 menjadi 11 bank pada bulan Oktober di tahun 2013. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah sempat mengalami peningkatan dan penurunan, dari 26 bank pada tahun 2007, 27 bank pada tahun 2008, dan menurun menjadi 23 bank pada tahun 2013. Peningkatan dan penurunan ini dikarenakan terjadinya krisis moneter yang

⁶ Halim Alamsyah. *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonsia : Tantangan dalam menyongsong MEA2015* (http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan gubernur/Documents/6bf00812e40b4d0cb140ea80239c4966PerkembanganProspekPerbankanSyar iahIndonesiaMEA201.pdf

⁷ Ajen Mukarom. *Penelitian terdahulu dengan judul "Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor) 2009*

menyebabkan inflasi meningkat. Untuk BPRS berjumlah 114 bank pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 160 pada tahun 2013, seperti pada tabel 1.1 di bawah ini:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Okt 2013
Bank Umum							
Syariah							
- Jumlah Bank	3	5	6	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	401	581	711	1.21	1.40	1.745	1.050
				5	1		1.950
Unit Usaha							
Syariah							
- Jumlah bank umum konvensional yang memiliki	26	27	25	23	24	24	23
UUS							
- Jumlah Kantor	196	241	287	262	336	517	576
Bank							
Pembiayaan							
Rakyat Syariah							
- Jumlah Bank	114	131	138	150	155	158	160
- Jumlah Kantor	185	202	225	286	364	401	399
Total Kantor	782	1.02	1.22	1.76	2.10	2.663	2.925
	702	4	3	3	1	2.003	2.723

Sumber : Badan Pusat Statistik

 $^{^8\} Badan\ Pusat\ Statistik.\ http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx$

Pesatnya perkembangan bank syariah, ternyata tidak diikuti pemahaman serta pengetahuan para petani terhadap sistem operasional syariah. Hal ini, di tengarai karena lokasi para petani yang berada di daerah pedesaan sehingga jarang terjamah sosialisasi maupun iklan. Padahal, daerah pedesaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian di Indonesia dan dipastikan bisa semakin menghidupkan perbankkan syariah. Hal ini karena, sebagian besar atau hampir 70 persen rakyat Indonesia hidup di daerah pedesaan dan mereka memproduksi kurang lebih 40 persen dari produk domestik nasional bruto. Kegiatan-kegiatan mereka umumnya berupa usaha pertanian kecil pangan, sebagian kecil kegiatan pengolahan hasil pertanian, kegiatan industri kecil atau rumah tangga, serta kerajinan. Semua kegiatan ini melibatkan kegiatan pembiayaan untuk produksi disamping juga terdapat banyak kegiatan pembiayaan untuk tujuan konsumsi terutama karena tingkat pendapatan petani di daerah pedesaan yang rendah. Mereka pada umumnya hidup pada tingkat batas hidup.

Menanggapi fenomena di atas maka bank syariah harus dapat memahami perilaku konsumen memberikan wawasan dan pengetahuan tentang apa yang menjadi kebutuhan dasar konsumen, mengapa mereka membeli, di mana konsumen suka berbelanja, siapa yang berperan dalam pembelian, dan faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen memiliki kepentingan

⁹ Faried Wijaya. *Pengkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Edisi Pertama.* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), 203.

khusus bagi orang karena berbagai alasan, berhasrat mempengaruhi atau mengubah perilaku itu, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, perlindungan konsumen, serta kebijakan umum.¹⁰

Pada dasarnya perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dengan pengertian bahwa faktor internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan peribadi konsumen seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan dan sikap, usia dan tingkat kehidupan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan lain sebagainya. Sedangkan, faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan di luar konsumen tersebut seperti budaya, sub-budaya, kelas sosial, keluarga, kelompok acuan dan lain sebagainya. 11

Semua faktor tersebut di atas berpengaruh terhadap keputusan konsumen, disamping itu "Engel et al. yang dikutip Hotman menjelaskan bahwa keputusan konsumen selain karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal juga dipengaruhi keunggulan atau kualitas atribut produk dan jasa pelayanan". Keputusan konsumen bagi lembaga keuangan adalah calon nasabah untuk memilih lembaga keuangan yang memberikan pelayanan terbaik bagi usaha mereka. 12

-

¹⁰ Hotman Panjaitan, *Analisis Respon Konsumen Melalui Sistem Teknologi Informasi, Kualitas layanan dan Citra Perguruan Tinggi di Jawa Timur*. (Surabaya: PT Revka Petra Media. 2012), 2.

¹¹ Nugroho. *Perilaku Konsumen : Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta; PRENADA MEDIA, 2003), 15.

¹²Hotman Panjaitan, *Analisis Respon Konsumen melalui sistem Teknologi Informasi, Kualitas Layanan dan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur.* 2012

Menghadapi situasi seperti ini, salah satu pendapat utama sebagai dasar kebijakan perbankan yang selama ini diambil serta masih diyakini yaitu dimana kebijakan untuk menyediakan pembiayaan murah guna mendorong pembangunan masyarakat pedesaan. Kebijakan seperti ini telah dirancang, dilaksanakan dan ada beberapa yang cukup berhasil. Karena kebijakan tersebut menyangkut dua kelompok lembaga keuangan dan pembiayaan yang ada di daerah pedesaan yakni lembaga yang formal dan lembaga yang tidak formal. Ciri utama kebijakan tersebut adalah mendorong perkembangan lembaga-lembaga formal dengan berbagai cara dan sarana sementara lembaga tak formal cenderung dibatasi dan bahkan dicoba dieliminir. 13

Beberapa contoh lembaga-lembaga kredit yang biasanya beroperasi di daerah pedesaan menurut luas daerah operasinya dapat dibagi menjadi dua kelompok, diantaranya:¹⁴

- Lembaga-lembaga kredit yang biasanya beroperasi terbatas hanya pada suatu Desa tertentu saja. Termasuk dalam kelompok ini adalah Badan Kredit Desa (BKD), Lumbung Desa, dan koperasi-koperasi serba guna atau koperasi-koperasi kredit.
- Lembaga-lembaga kredit yang daerah kerjanya meliputi beberapa desa mungkin meliputi satu Kecamatan, Kabupaten, misalnya Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Perjan Pegadaian, Bank

¹³ Faried Wijaya, *Pengkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Edisi Pertama*, 203.

¹⁴ Ibid., 204.

Rakyat Indonesia (BRI) kantor cabang atau perwakilan,atau unit Desa atau lembaga pembiayaan usaha perorangan.

Ada beberapa alasan yang menguatkan agar sektor pertanian diberdayakan melalui bank syariah, diantaranya pertama, sistem syariah lebih sesuai dengan karakter petani di Indonesia, sehingga lebih memungkinkan untuk diterapkan, dibandingkan dengan sistem bunga. Pada sistem syariah, yang dituntut adalah kemampuan petani untuk memproduksi hasil pertanian. Misalnya pada skema pembiayaan bai' as-salam, dimana petani mendapatkan modal untuk berproduksi sesuai biaya actual yang dibutuhkan dan mendapat keuntungan dengan presentasi tertentu. Kewajiban petani berdasarkan skema tersebut adalah menyerahkan produk pertanian dengan kriteria yang telah disepakati kepada pemberi modal. Bank dapat menunjuk suatu lembaga untuk memasarkan produk pertanian tersebut. Berbeda dengan sistem konvensional, dimana yang menjadi titik tekannya adalah pengembalian pinjaman plus bunga. Kedua, bank syariah lebih menitik beratkan pada investasi riil, dan sektor pertanian merupakan bagian dari sektor riil. Sehingga mampu menjawab problematika aksebilitas pembiayaan bagi petani. Hal ini dapat menjadi jembatan untuk mengintegrasikan pasar keuangan syariah dengan sektor pertanian, antara lain melalui penerbitan sukuk untuk pertanian. Ketiga, bank syariah dapat menjadi subtitusi kebijakan subsidi pemerintah untuk sektor pertanian. Selama ini subsidi yang diberikan pemerintah lebih menitik beratkan pada subsidi sarana produksi pertanian. Pada praktiknya seringkali subsidi tersebut salah sasaran akibat terjadinya moral *hazard*. ¹⁵

Pembiayaan syariah khusus petani untuk usaha taninya disini ialah pembiayaan *istiṣna* yang merupakan akad kontrak jual beli pesanan antara pihak produsen, pengrajin atau penerima pesanan *(sani)* dengan pemesan *(mustaṣni)* untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu *(maṣnu)* dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. ¹⁶

Perbankan syariah di Kecamatan Sumberrejo adalah Bank Syariah Mandiri yang merupakan satu-satunya perbankan syariah yang ada di Kecamatan Sumberrejo. Letaknya sangat strategis karena dekat dengan pasar Sumberrejo. Akan tetapi, petani yang menjadi nasabah pembiayaan istisna hanya sedikit. Para petani kebanyakan menjadi nasabah di lembaga keuangan lainnya yang ada disekitar pasar Sumberrejo pula. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan mengambil dua desa yaitu Desa Sumberrejo dan Desa Ngampal. Pemilihan desa tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sentra tanaman pangan, peternakan, perikanan di Kecamatan Sumberrejo, jumlah penduduk menurut lapangan kerja, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah serta pertimbangan peneliti.

_

¹⁵ Ajen Mukarrom. *Analisis Persepsi Petani terhadap perbankan Syariah (Study Kasus di Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor).* 2008

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA Perenada Media Group, 2011), 146.

Petani dalam mengajukan pembiayaan cukup mempengaruhi timbulnya tuntutan akan pemenuhan pembiayaan yang mereka minati dan akan membantu usaha mereka nantinya. Lembaga keuangan yang sangat membantu akan usaha taninya. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi lembaga keuangan untuk mengembangkan usahanya yaitu perbankan syariah. Keadaan yang demikian juga terjadi masyarakat Sumberrejo dan sekitarnya, sehingga menimbulkan meningkatnya permintaan terhadap perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan istisna di bank syariah mandiri (BSM). Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji judul "Respons Petani terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Pembiayaan Istisna pada Bank Syariah Mandiri, di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari deskripsi yang ada di dalam latar belakang di atas, maka dapat digambarkan masalah yang akan muncul terkait respon para petani di Kecamatan Sumberrejo terhadap keberadaan perbankan syariah, yaitu:

 Lembaga keuangan berbasis perbankan Syariah yang bertugas menghimpun dana dapat membuat masyarakat (nasabah perbankan syariah) yang mempercayakan dananya disimpan bank syariah dan penyalurkan dana yang ada kepada masyarakat (nasabah perbankan syariah) unuk pembiayaan usaha taninya.

- 2. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mempromosikan keberadaannya dan memberikan informasi tentang pentingnya bank syariah untuk masyarakat petani di Kecamatan Sumberrejo khususnya dalam pembiayaan *istisna*.
- 3. Karakteristik dan minat petani terhadap pembiayaan istisna'.
- 4. Respons masyarakat petani Kecamatan Sumberrejo terhadap upaya dari bank syariah dalam mempromosikan produk pembiayaan *istiṣna* dan keberadaannya.

Dari identifikasi masalah tersebut di atas. Maka permasalahan yang akan dibahas, kami batasi sebagai berikut :

- 1. Karakteristik yang dimiliki para nasabah petani pembiayaan istisna'.
- 2. Usaha terhadap promosi produk pembiayaan *istisna*' bank syariah pada para petani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana minat petani terhadap pembiayaan istisna'?
- 2. Bagaimana karakteristik nasabah petani terhadap pembiayaan *istisna*?
- 3. Bagaimana respons petani di Kecamatan Sumberrejo terhadap pembiayaan *istiṣna*'?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi di antaranya:

- 1. Ajen Mukarom (2009) yang berjudul "Analisis Persepsi Petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah". ¹⁷ Pada penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar petani membiayai usaha taninya menggunakan sumber pembiayaan dari modal sendiri, tetapi ada juga petani yang menggunakan sumber pembiayaan dari luar. Sumber pembiayaan dari luar diakses petani di anataranya diperoleh dari lembaga keuangan non formal dan lembaga keuangan formal, tetapi ada juga petani yang mengakses keduanya. Namun dari semua petani responden subsektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan tidak ada yang menggunakan Lembaga Keuangan Syariah sebagai sumber pembiayaan usaha taninya.
- 2. Erdi Marduwira (2010) yang berjudul "Akad Istiṣna' dalam Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Cinere", pada penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur atau pembiayaan akad

¹⁷ Ajen Mukarom, *Analisis Persepsi Petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah-Studi Kasus di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,

Institut Pertanian Bogor, 2009)

istishna' di Bank Syariah Mandiri bagi calon nasabah/mitra/debitur adalah mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang berlaku mengenai pembiayaan istisna' di Bank Syariah Mandiri. Dan persaingan antara lembaga keuangan dimana bank syariah lainnya banyak menawarkan produk pembiayaan yang sama. Tentunya hal ini memerlukan penanganan dan penyelesaian yang baik.

Untuk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan yang ada pada skripsi sebelumnya, yaitu bahwa skripsi yang berjudul "Respons Petani terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Pembiayaan Istisna" pada Bank Syariah Mandiri, di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro)" yang pembahasannya lebih difokuskan kepada analisis tentang respons petani yang dilihat dari pembiayaan istisna" yang mereka ajukan kepada perbankan syariah. Jadi disini akan dianalisis bagaimana respons petani terhadap keberadaan bank syariah untuk membiayai usaha taninya.

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka perlu diketahui tujuan penelitian dari satu persatu rumusan masalah tersebut, di antaranya sebagai berikut:

- 1. Mengidentifikasi minat petani terhadap pembiayaan *istisna*.
- 2. Mengidentifikasi karakteristik nasabah petani terhadap pembiayaan *istisna*.

3. Menganalisis respons petani di Kecamatan Sumberrejo terhadap pembiayaan *istisna*⁴.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan skripsi ini diantaranya:

 Kegunaan teoretis, sebagai salah satu literatur kajian ilmiah dalam bidang ekonomi khususnya untuk mengetahui secara mendalam tentang Perbankan Syariah yang berguna bagi mahasiswa dan para pelaku Perbankan Syariah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah, serta dapat menambah wawasan pengetahuan tentang manajemen Perbankan Syariah di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi tentang pentingnya respon petani terhadap perbankan syariah.
- c. Bagi pemimpin perusahaan, sebagai masukan bagi pemimpin perusahaan perbankan syariah di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro agar lebih meningkatkan strategi dalam menyampaikan tentang posisi perbankan syariah.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul "Respons Petani terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Istisna' pada Bank Syariah Mandiri di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro)" Sebagai berikut:

- 1. Respons merupakan bagian dari proses prilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong perilaku konsumen pada kecenderungan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Hal ini dalam proses transaksi modal pembiayaan dalam bertani. Kata respons di ambil dari bahasa belanda yang kemudian di serap dalam bahasa indonesia dengan kata respons, yang artinya tanggapan, reaksi dan jawaban.¹⁸
- 2. Pembiayaan *istiṣna*' merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya yang disetujui terlebih dahulu. *Istiṣna*' adalah akad penjualan antara *al-Mustaṣnī*' (pembeli) dan *as-ṣanī*' (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).
- 3. Perbankan syariah disini merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*).

¹⁸ Kbbi.web.id/

H. Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah di atas yang lebih menekankan pada analisis yang ada maka pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁹

Dalam penelitian tentang "Respons Petani terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Istisna" pada Bank Syariah Mandiri, di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro)" Dalam tahapan-tahapan tertentu yang pembahasannya bisa tepat dan teratur sesuai dengan proporsinya, maka penulis perlu untuk mendeskripsikan metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Agar penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dan mempertanggung jawabkan secara relevan, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

- a. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah minat masyarakat petani terhadap pembiayaan *istiṣna*' di BSM.
- b. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data tentang karakteristik nasabah pembiayaan *istisna* dari BSM.
- c. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang respons masyarakat petani di Kecamatan Sumberrejo tentang

¹⁹ Burhan Ashshofa S.H, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka cipta, 1996), 20

pembiayaan istisna' di BSM.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data dapat diperoleh.²⁰

a. Sumber primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).²¹. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. ²² Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para nasabah petani yang pernah melakukan pembiayaan di Lembaga keuangan Kecamatan Sumberrejo, Pimpinan Cabang Pembantu Perbankan Syariah di Kecamatan Sumberrejo, dan Kepala Desa.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder diperoleh dengan cara mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pengambilan data sekunder diperoleh juga dari literatur-literatur, hasil penelitian terdahulu,

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1997), 129.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

 $^{^{22}}$ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 123.

jurnal, artikel, situs badan pusat statistik, Dinas Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, Laporan Kantor Kecamatan Sumberrejo, Laporan Kantor Kelurahan Desa Sumberrejo, situs Bank Indonesia, situs Badan Statistik Pusat dan instansi-instansi terkait yang dapat mendukung penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu Tanya jawab dengan nasabah petani dan petani yang belum menjadi nasabah Perbankan Syariah di Kecamatan Sumberrejo tentang pentingnya bank syariah.
- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan. Kuesioner diberikan kepada petani di Desa Sumberrejo kemudian diminta untuk mengisi kuesioner yang diberikan.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan petani dan pertanian di Kecamatan Sumberrejo.²³
- d. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teoriteori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada

²³ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87

hubungannya dengan penelitian ini. 24

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁵ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²⁶ Ibid., 245.

jawaban dari rumusan masalah. 27

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. ²⁸ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. ²⁹ Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah respons masyarakat petani terhadap adanya lembaga keuangan perbankan syariah dan pengaruhnya tingkat kepentingan bank syariah tersebut untuk masyarakat petani di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Penulis memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kecamatan Sumberrejo

²⁷ Ibid., 246.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

²⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

dan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut:

BAB pertama merupakan pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis skripsi ini, yakni terdiri dari latar belakang

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,

dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB kedua yakni berisi tentang landasan teori yang sesuai dengan

permasalahan yang akan dibahas terkait dengan objek

penelitian yaitu teori perilaku konsumen, respons

konsumen, dan juga memuat penelitian terdahulu yang

relevan.

berisi tentang jenis penelitian, gambaran umum tentang

respons masyarakat petani di Kecamatan Sumberrejo

tentang pendapatnya terhadap bank syariah Kecamatan

Sumberrejo dalam memilih lembaga keuangan yang akan

BAB ketiga

diambilnya dan aplikasinya dilapangan.

BAB keempat

berisi tentang analisis karakteristik umum masyarakat petani di Kecamatan Sumberrejo dan bagaimana respons masyarakat petani terhadap tingkat kepentingan pelaksanaan kinerja perbankan syariah di Kecamatan Sumberrejo. Dan menganalisis respons masyarakat petani terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini.

BAB kelima

berupa penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca, *civitas akademika*, serta para peneliti lainnya untuk perkembangan penelitian secara lebih lanjut.